



**PERJANJIAN KINERJA  
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Ersi Soenarsih  
Jabatan : Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sally Salamah  
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik  
oleh

Sally Salamah  
NIP. 19670420 198703 2 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik  
oleh

R. Ersi Soenarsih  
NIP. 19660830 198703 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TARGET SETAHUN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				SATUAN	TOTAL
1		2		3	4
1	Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Badan Usaha	16,00
		1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	BUMN	19,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Badan Usaha	14,00
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Badan Usaha	20,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN	4.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	BUMN	12,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	5.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Badan Usaha	11,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah BUMN dengan MRI >= Level 3	BUMN	48,00
		6.2	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMN	10,00
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputy Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80,00
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00
		7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1,00
8	Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputy Akuntan Negara	8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00
		8.2	Persentase Penyelesaian RTP(MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00
9	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputy Akuntan Negara	9.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	(%) Persen	100,00
		9.2	Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	(%) Persen	100,00
		9.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	(%) Persen	100,00

Kegiatan		Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan	Rp	1.881.200.000,00
2. Dukungan Manajemen Internal	Rp	<u>1.375.000.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>3.256.200.000,00</u>

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik  
oleh

Ditandatangani secara elektronik  
oleh

Sally Salamah

NIP. 19670420 198703 2 001

R. Ersi Soenarsih

NIP. 19660830 198703 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KEUANGAN, JASA PENILAI,**  
**DAN MANUFAKTUR**  
**AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN**

NO	KODE	LEVEL	SEKTOR/TEMA/ TOPIK PENGAWASAN	PERAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.2.a	TOPIK	Sistem Kesehatan Nasional	Kontributor	-	✓	-	-
2	A.2.b	TOPIK	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	Kontributor	-	✓	-	-
3	A.2.c	TOPIK	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	Kontributor	-	✓	-	-
4	A.2.e	TOPIK	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	Kontributor	-	✓	-	-
5	A.2.g	TOPIK	Akuntabilitas penanganan Covid-19	Kontributor	✓	-	-	-
6	A.2.i	TOPIK	Skema Kesehatan Adaptif	Kontributor	-	✓	-	-
7	A.3.c	TOPIK	Penguatan Platform Penyaluran s.d. Pemanfaatan Bantuan Sosial	Kontributor	-	-	-	✓
8	C.1.d	TOPIK	Optimalisasi Pembiayaan Inovatif	Kontributor	-	✓	-	-
9	C.4	TEMA	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
10	C.4.a	TOPIK	BUMN	Kontributor	-	✓	-	-
11	C.4.c	TOPIK	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
12	D.2.a	TOPIK	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
13	D.2.b	TOPIK	Akses Permodalan UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
14	D.3.a	TOPIK	P3DN	Kontributor	✓	✓	✓	✓
15	E.1.c	TOPIK	Tata Kelola Pupuk Nasional	Kontributor	-	-	✓	-
16	E.2.a	TOPIK	Penanganan Pasca Panen	Kontributor	-	-	✓	-
17	E.2.b	TOPIK	Supply Chain Komoditas Pangan	Kontributor	-	-	✓	-
18	E.2.c	TOPIK	Kebijakan Stabilisasi Harga	Kontributor	-	-	✓	-
19	E.3.d	TOPIK	Efisiensi Industri Pupuk Nasional	Penanggung Jawab	-	-	✓	-
20	F.1.b	TOPIK	Tata Kelola Pendanaan	Kontributor	✓	-	-	-
21	G.1.g	TOPIK	Manajemen Risiko Badan Usaha	Penanggung Jawab	-	-	-	✓

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik  
oleh

Sally Salamah  
NIP. 19670420 198703 2 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik  
oleh

R. Ersi Soenarsih  
NIP. 19660830 198703 2 001

